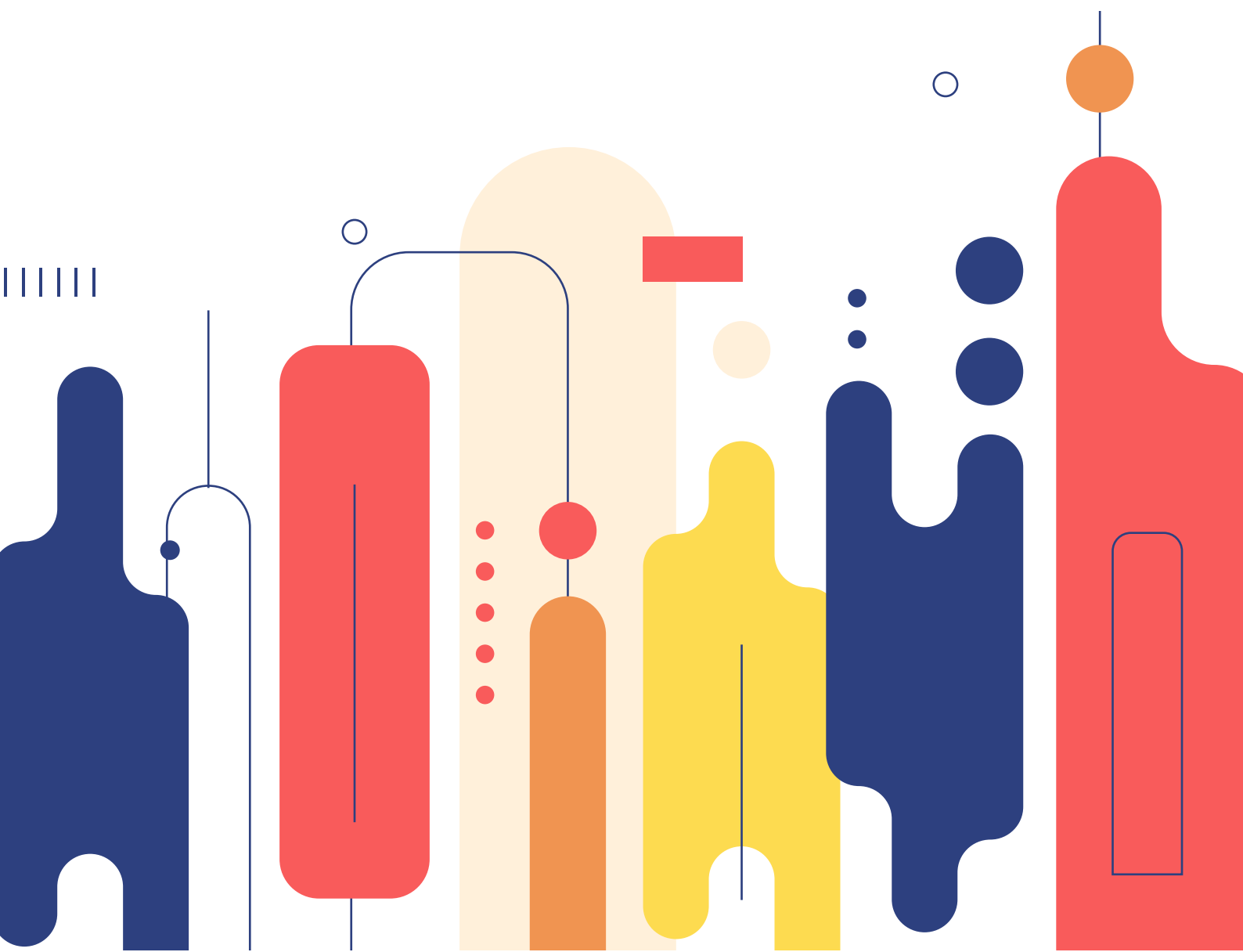


LAPORAN TATA KELOLA 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Kebon Sirih No.77 Jakarta Pusat 10340

Nomor Telepon : 213911914

Penjelasan Umum : Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR Gamon, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan, maka BPR Gamon wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas SEOJK No.5.SEOJK.03.2016 dan Peraturan Jasa Keuangan No.4.POJK.03.2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan Tata Kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BPR Gamon. Hal ini dilakukan terus menerus dalam upaya meningkatkan implementasi prinsip prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR Gamon berpedoman pada Prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu : 1. Transparansi(Transparency), adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas(Accountability), adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Independensi(Independency), adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran(Fairness), adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. BPR Gamon akan terus menerus berupaya untuk menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat, berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlandaskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muljono Tarius	Direktur Utama	Melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan BPR. Memonitor, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi unit kerja dibawah tanggung jawabnya. Meningkatkan koordinasi semua fungsi dengan menciptakan team work sebaik baiknya. Meningkatkan kompetensi SDM untuk kemajuan BPR. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Bisnis. Memastikan pengawasan operasional telah dilakukan dengan baik dan benar. Merencanakan, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja seluruh karyawan. Menyusun rencana, strategi dan pengawasan terkait dengan Kredit, Marketing dan Administrasi Kredit. Memastikan pengawasan terhadap unit kerja Accounting, Front Office dan Back Office berjalan dengan baik dan benar. Mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal. Melakukan perencanaan, strategi dan pengawasan terhadap Keuangan, Likuiditas dan ABA. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan anggaran dasar serta menentukan kebijakan BPR.
2	Retnowati Septiari	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan, memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain, Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR, Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR, Melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan BPR, Memonitor, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi unit kerja dibawah tanggung jawabnya. Meningkatkan koordinasi semua fungsi dengan menciptakan team work sebaik baiknya. Meningkatkan kompetensi SDM untuk kemajuan BPR. Bersama Direktur Utama menyusun Rencana Kerja dan Rencana Bisnis. Melakukan pengawasan unit kerja Accounting, dan Pengawasan aktif terhadap APU PPT PPSPM, Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan, Memonitor hasil tindak lanjut temuan Audit Internal dan eksternal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Edie Lo	Direktur	Melaksanakan pengawasan umum yang meliputi : Mengecek penyimpanan dokumen dan agunan kredit, Memonitor pelaksanaan rencana kerja secara berkala, Menyelenggarakan analisa kinerja secara berkala untuk meningkatkan kinerja BPR secara keseluruhan. Kredit dan Marketing meliputi : Menyusun rencana dan strategi marketing, serta melakukan inovasi produk, Mengintensifkan kegiatan marketing dengan melakukan kunjungan on the spot untuk menjaring prospek nasabah, Membuat daftar nasabah existing yang potensial dan melakukan kunjungan, Meningkatkan volume kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, Menjaga kualitas kredit sampai dengan jatuh tempo dan lunas, Melakukan pengawasan atas kredit yang telah dicairkan dan berjalannya kunjungan rutin, Menyelesaikan kredit bermasalah. Keuangan, Likuiditas dan ABA meliputi : Membuat perencanaan dan melakukan pemantauan kebutuhan akan likuiditas minimal satu minggu ke depan, Mengatur penempatan terhadap deposito ABA untuk mengoptimalkan posisi likuiditas maupun profitabilitas, Menjaga saldo di rekening giro agar cash ratio dan kebutuhan operasional sehari hari dapat terpenuhi, Memastikan semua dokumen, surat-surat berharga ABA milik BPR tersimpan rapi dan melakukan stock opname.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Erny Utama	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang operasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan dan atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ada pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Menyetujui kebijakan perkreditan BPR sesuai ketentuan OJK. Menyetujui rencana kerja BPR yang diusulkan Direksi serta memantau pelaksanaannya. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja kepada OJK. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Direksi. Dalam melaksanakan fungsinya, Komisaris Utama lebih menekankan bidang bidang Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Likuiditas dan penempatan dana Antar Bank Aktiva.
2	Kartika Dewi	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang operasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan dan atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ada pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Menyetujui kebijakan perkreditan BPR sesuai ketentuan OJK. Menyetujui rencana kerja BPR yang diusulkan Direksi serta memantau pelaksanaannya. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja kepada OJK. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Direksi. Dalam melaksanakan fungsinya, Komisaris lebih menekankan bidang bidang Operasional, sistem dan akuntansi, pemberian kredit dan pengawasan kredit, Masalah compliance dan Risk Management

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham di PT. BPR Gamon

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edie Lo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Retnowati Septiari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Muljono Tarius	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muljono Tarius	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Retnowati Septiari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Edie Lo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Erny Utama	840.000.000	6,00
2	Kartika Dewi	840.000.000	6,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komirasis merupakan pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Erny Utama	PT. BPR Gitamakmur Utama	6,00
2	Erny Utama	PT. BPR Pantura Abadi	6,00
3	Erny Utama	PT. Haga Bangun Bersama	6,00
4	Erny Utama	PT. Bangun Latih Cendikia	20,00
5	Kartika Dewi	PT. BPR Gitamakmur Utama	6,00
6	Kartika Dewi	PT. BPR Pantura Abadi	6,00
7	Kartika Dewi	PT. Haga Bangun Bersama	6,00
8	Kartika Dewi	PT. Ratu Indalu	30,00
9	Kartika Dewi	PT. Bangun Latih Cendikia	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Erny Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kartika Dewi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan komisaris lain, anggota Direksi maupun Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Erny Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kartika Dewi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1531038533	2	505768050
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1531038533		505768050

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	tidak ada
2	Transportasi	Direktur Utama mendapatkan fasilitas kendaraan dinas	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,06	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,50	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,25	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,50	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26-01-2023	6	Membahas Laporan Kualitas portfolio kredit BPR Gamon per 31 Desember 2022 dibandingkan yoy dan posisi bulan sebelumnya, dilaporkan progress penagihan kredit bermasalah, Progress Debitur Restrukturisasi.
2	23-02-2023	10	Membahas Realisasi RBB dan Pencapaian Kinerja BPR pada Kuartal IV tahun 2022
3	24-02-2023	6	Membahas atas pemenuhan ketentuan yang mengacu pada POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dimana BPR yang sudah mencapai ekuitas diatas Rp. 50 Milyar, jumlah masing masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi jumlah minimum, yakni sebanyak 3 (tiga) orang.
4	13-04-2023	10	Membahas Realisasi RBB dan Pencapaian Kinerja BPR Gamon pada Kuartal I tahun 2023.
5	25-05-2023	11	Membahas Kualitas portfolio kredit BPR Gamon per 30 April 2023 dibandingkan yoy dan posisi bulan sebelumnya, Laporkan progress penagihan kredit bermasalah, Progress Debitur Write Off (WO), Progress Debitur Restrukturisasi.
6	13-07-2023	10	Membahas Realisasi RBB dan Pencapaian Kinerja BPR Gamon pada Kuartal II tahun 2023.
7	20-07-2023	5	Pembahasan : Notaris Rekanan dan Fee Notaris, Laporan Progress Core Banking Teradata, Kalender tahun 2024, Pembentukan SAM (Special Asset Manajemen) Departemen, Rencana recruitment tenaga marketing, Pengaturan survey target promo akhir tahun.
8	10-08-2023	5	Pembahasan : Pencapaian kinerja BPR Gamon, Tanggapan Dewan Komisaris terhadap realisasi Rencana Bisnis BPR Gamon pada Semester I (Satu) tahun 2023, Penerapan Tata Kelola, Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Penerapan Manajemen Risiko Operasional, Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, Penerapan Sistem Pengendalian Intern.
9	19-08-2023	11	Pembahasan : Kualitas portfolio kredit BPR Gamon per 31 Juli 2023 dibandingkan yoy dan posisi bulan sebelumnya, Daftar Debitur Bermasalah pada Kantor Pusat Kebon Sirih, Daftar Debitur Bermasalah pada Kantor Cabang Kelapa Gading.
10	31-08-2023	13	Pembahasan : Hasil Pemeriksaan Audit BPR Gamon KPO Kebon Sirih,
11	14-09-2023	11	Laporan Implementasi Kepatuhan bulan Agustus tahun 2023 meliputi : Implementasi Pemantauan APU PPT, Pemantauan Pelaksanaan Sosialisasi POJK baru/ SE Internal/ Kebijakan Terkait BPR, Rekomendasi Direktur Kepatuhan atas Keputusan Kredit, Pemberian Kredit untuk Pihak Terkait harus mendapat Rekomendasi dari Komisaris, Rekomendasi Direktur Kepatuhan atas Keputusan ALCO, Pemantauan Rasio posisi per 31 Agustus 2023 (akhir bulan), Hasil Pemantauan POJK Baru / Peraturan Perundang Undangan Baru yang Relevan dengan BPR.
12	26-10-2023	11	Membahas Realisasi RBB dan Pencapaian Kinerja BPR Gamon pada Kuartal III tahun 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2023 terdapat 14 (empat belas) rapat direksi dan dewan komisaris. Dua diantaranya: Rapt Tanggal 3 November 2023 membahas "Laporan Direksi mengenai rencana pemeriksaan laporan keuangan PT. BPR Gamon untuk tahun buku 2023 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sekaligus untuk memutuskan penunjukan KAP yang akan melakukan audit tahunan atas laporan keuangan BPR. dan Rapat Tanggal 16 November 2023 membahas rencana pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dan Rencana Kerja tahun 2024. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Erny Utama	0	12	100,00
2	Kartika Dewi	0	12	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris selalu hadir dalam Rapat

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023, PT. BPR Gamon tidak terjadi penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 PT. BPR Gamon tidak terdapat permasalahan hukum baik secara pidana maupun perdata, baik yang berkaitan dengan simpanan dana nasabah maupun penyalahgunaan dalam penyaluran/pemberian fasilitas kredit.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Timoty E Marnandus	Pemegang Saham Pengendali	Muljono Tarius	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	1.000	Sewa Gedung untuk kegiatan Operasional kantor pusat Jl.Kebon Sirih No.77 Jakarta. Jangka waktu 01 Feb 2022 sd 31 Jan 2023 dan diperpanjang 1 tahun kedepan, periode : 01 Feb 2023 sd 31 Jan 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sewa gedung berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh pihak pemilik dan pihak penyewa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2023 BPR tidak melakukan Bakti Sosial seperti tahun tahun sebelumnya.

Nama BPR	: PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jalan Kebon Sirih No.77 Jakarta Pusat 10340
Nomor Telepon	: 213911914
Modal Inti BPR	: 65.791.598.140,00
Total Aset BPR	: 645.622.643.774,00
Bobot BPR	: C
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,1
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	Berdasarkan hasil Analisa pada kertas kerja self assessment Tata Kelola, hasil penilaian penerapan Tata Kelola di PT. BPR Gamon secara umum adalah Sangat Baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas 10(sepuluh) faktor penilaian dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi, dengan Modal Inti BPR diatas Rp.50 Miliar, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris, Komisaris telah melaksanakan pengawasan, pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 3. BPR telah memiliki kebijakan terkait Penerapan dan penanganan Benturan Kepentingan. 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Pejabat eksekutif yang menangani Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU PPT PPPSPM dan satuan kerja telah terpenuhi. 5. Penerapan Fungsi Audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern BPR telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern, Akuntan Publik telah terdaftar di OJK dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 7. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian intern telah diterapkan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas BPR dan Dewan Komisaris telah senantiasa melakukan tugas pengawasan sesuai ketentuan dan panduan dari pihak OJK. 8. PT. BPR Gamon telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi dalam bentuk PKPB. 9. Rencana Bisnis, RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK. 10. BPR Gamon telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan. PT.BPR Gamon senantiasa akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.200	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya, antara lain : 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Direksi telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. 4. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Sesuai ketentuan OJK dan Modal Inti yang dimiliki BPR, komposisi Direktur sesuai Modal Inti BPR telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur Utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,40	0,10	1,17	0.176	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya , antara lain : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan BMPK BPR. 3. Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik dan telah sesuai dengan ketentuan POJK No.4 Tahun 2015 dan SEOJK No. 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas SEOJK No.5 Tahun 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang tercermin dari : a. Tidak adanya anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. b. Sesama Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham. c. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki sertifikasi komisaris, sesuai dengan kenaikan Modal Inti BPR, pemenuhan komposisi dan jumlah Anggota Dewan Komisaris (penambahan 1 orang anggota komisaris independen) saat ini sedang dalam proses.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Sesuai Modal yang dimiliki BPR sesuai ketentuan BPR belum membentuk komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT.BPR Gamon atau mengurangi keuntungan BPR, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan, dan di tahun 2023 PT.BPR Gamon tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Benturan kepentingan telah ditangani dengan Kebijakan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,40	0,13	1,03	0.103	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan fungsinya dengan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang telah dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas pengawas lainnya, dengan melakukan : 1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR. 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang undangan lain yang relevan. 3. Memastikan bahwa masing masing unit kerja telah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku serta agar BPR tetap sehat dan mampu berkembang, maka BPR senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang. Sepanjang tahun 2023 Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal disampaikan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dan auditee wajib menindaklanjuti temuan audit. Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sehingga Satuan Kerja Audit Intern dapat bekerja secara Independen dari kerja operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Pelaksanaan fungsi audit ekstern yang dilakukan tahun 2023 sebagai berikut : 1. Berdasarkan RUPS Pemegang Saham Luar Biasa dan rekomendasi dari Direksi, PT. BPR Gamon telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT. BPR Gamon untuk tahun buku 2023 secara independen. 2. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik harus berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek aspek kapasitas yang ditunjuk. 3. Legalitas perjanjian, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penunjukan KAP yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan PT. BPR Gamon tahun buku 2023. 4. Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan menyampaikan hasil audit tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,67	0,40	0,10	1,17	0.117	Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan BPR adalah diantaranya, BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU PPT PPPSPM. Adapun wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: 1. Memantau pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui Direksi. 2. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, 3. Mengkaji usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. 4. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan APU PPT PPPSPM telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. BPR Gamon telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat atau pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas, serta telah menerapkan fungsi dual control dalam setiap kegiatan operasional BPR. Sistem dan prosedur pelaksanaan telah dituangkan dalam Surat Keputusan dan SOP atau SE dan sarana lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BPR telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi atau Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR dalam pemberian kredit kepada pihak terkait. Dan telah melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. PT. BPR Gamon tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maupun dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Pengambilan keputusan penyediaan dana kepada nasabah terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen oleh Komite Kredit sesuai ketentuan yang berlaku. PT. BPR Gamon telah menyampaikan laporan BMPK ke Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dilaporkan ke OJK. Adapun Rencana bisnis BPR yang telah dilaporkan mencakup : 1. Ringkasan Eksekutif. 2. Strategi bisnis dan kebijakan. 3. Proyeksi Laporan Keuangan: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba rugi, Rekening administratif. 4. Target Rasio keuangan pokok dan rasio pos tertentu. 5. Rencana Penghimpunan Dana. 6. Rencana Penyaluran dana, terdiri : Penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar, berdasarkan jenis penggunaan dan berdasarkan jenis usaha. 7. Rencana Permodalan. 8. Rencana pengembangan IT yang bersifat mendasar. 9. Rencana rekrutmen SDM. 10. Rencana pendidikan dan pelatihan. 11. Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya. 12. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru. 13. Rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor. 14. Informasi lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan bank yang telah diterapkan dan dilakukan oleh BPR, tercermin dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan tepat waktu, jenis dan cakupannya telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi : a.Laporan Keuangan dan non keuangan PT.BPR Gamon telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.b.Laporan keuangan yang telah di audit dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan secara transparan dilaporkan kepada publik tepat waktu.
Nilai Komposit						1.1	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Dengan modal inti lebih dari Rp50 M, jumlah anggota Direksi telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi BPR tidak merangkap jabatan baik di perusahaan non bank maupun pada lembaga lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada hubungan keluarga diantara Anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak memiliki penasehat perorangan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota telah mengikuti dan memiliki Sertifikasi dan telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta diangkat melalui RUPSLB BPR.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Sudah memenuhi
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit intern, ekstern hasil pengawasan OJK dan hasil pengawasan otoritas lain, monitoring tindak lanjut atas temuan Audit OJK dilakukan oleh PE Kepatuhan yang disampaikan pada setiap breafing meeting BPR.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi memberikan laporan kepada Dewan Komisaris setiap bulan.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Secara berkala dilakukan rapat Direksi dan sampai saat ini tidak ada perbedaan pendapat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Tidak terdapat benturan kepentingan.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan setiap karyawan, Direksi mengikutsertakan karyawannya dalam program training sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi telah dan selalu memberikan pemahaman terkait ketentuan BPR pada setiap kesempatan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Sudah ada SK yang mengatur tata tertib Direksi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun mengadakan RUPS Tahunan yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi selalu menginformasikan langsung kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian pada BPR
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat dituangkan ke dalam notulen rapat yang diberi nomor registrasi agar dapat didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Setiap tahun Direksi mengadakan program training yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan para Direksi dan karyawan untuk menunjang keberhasilan dalam mengelola BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Pemenuhan atas kekurangan 1 Komisaris sedang dalam proses pengajuan kepada OJK sesuai Surat Permohonan Fit & Proper Test nomor KBS.B.054.1223 tertanggal 15 Desember 2023.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Telah memenuhi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Telah memenuhi
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Telah memenuhi
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pemenuhan atas kekurangan 1 Komisaris sedang dalam proses pengajuan kepada OJK sesuai Surat Permohonan Fit & Proper Test nomor KBS.B.054.1223 tertanggal 15 Desember 2023.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah ada SK yang mengatur tata tertib Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Telah memenuhi
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Telah memenuhi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Pemenuhan atas kekurangan 1 Komisaris sedang dalam proses pengajuan kepada OJK sesuai Permohonan Fit & Proper Test dengan nomor surat KBS.B.054.1223 tertanggal 15 Desember 2023.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan rapat dengan direksi secara rutin. Hasil rapat dituangkan ke dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Telah dilakukan.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas pemberian kredit kepada pihak terkait sesuai ketentuan otoritas.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris mengawasi Direksi dalam menindaklanjuti hasil Audit yang dituangkan dalam laporan hasil tindak lanjut temuan Audit.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris secara reguler mengadakan rapat dengan Direksi yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dekom dan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Telah dilakukan rapat Dewan Komisaris tetapi sejauh ini belum ada perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Telah memenuhi.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Penyampaian Laporan telah dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah ada notulen rapat Dewan Komisaris tetapi sejauh ini belum ada perbedaan pendapat
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Kebijakan sudah ada namun prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan masih dalam tahap pengaturan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dan penghimpunan dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Telah memenuhi.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR telah memiliki PE Kepatuhan yang telah dilaporkan dan telah tercatat di OJK dan BPR telah memiliki satuan kerja yang secara struktur terdiri dari PE Kepatuhan dan staff Kepatuhan yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas Manajemen Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT PPPSPM
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Tugas-tugas kerja terkait fungsi Kepatuhan telah dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki Ketentuan Intern terkait dengan tugas dan tanggung jawab PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Telah memenuhi
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Telah memenuhi
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Telah memenuhi
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Telah memenuhi
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Secara berkala PE Kepatuhan melakukan review terhadap SE yang berlaku di BPR untuk disesuaikan dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan berlaku.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR berkomitmen menerapkan ketentuan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas dan melakukan pemantauan terhadap ketentuan ketentuan baru dari OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan secara bulanan telah melaporkan Aktivitas PE Kepatuhan kepada Direktur Utama dan memberi pemaparan dalam rapat Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan melapor ke OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang undangan lain.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki satuan kerja Audit Intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	BPR telah memiliki pedoman dan prosedur
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Satuan Kerja Audit Intern Independen dari satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sesuai struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR telah mengikutsertakan PE Audit Intern dalam Training Audit
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya telah berpedoman pada ketentuan BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi Audit Intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Sudah dilakukan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR telah mengikutsertakan PE Audit Intern dalam Training Audit
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Satuan Kerja Audit Intern telah melaksanakan fungsi audit intern dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris BPR dan pembahasan hasil Audit secara rutin dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditatausahkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris BPR.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan pengangkatan PE Audit Internal kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Rencana Permeriksaan laporan keuangan oleh KAP telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan sudah mendapat persetujuan dalam RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit KAP telah disampaikan ke Pihak otoritas dan telah di Publikasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Telah memenuhi
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Dengan Modal Inti diatas Rp. 50 Milliar, BPR membentuk satuan kerja manajemen risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Telah memenuhi
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Apabila ada produk dan aktivitas baru, BPR akan membuat kebijakan dan prosedur tertulis.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Telah memenuhi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Telah memenuhi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	Telah memenuhi
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Telah memenuhi
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Telah memenuhi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Profil Risiko BPR telah dilaporkan kepada Otoritas sesuai dengan ketentuan dan pedoman OJK.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Apabila ada produk dan aktivitas baru, BPR akan melapor ke OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR mengeluarkan surat keputusan Direksi dalam pemberian kredit kepada pihak terkait.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah melakukan penyesuaian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	BPR dalam proses pemberian kredit selalu mengacu kepada ketentuan OJK yang tertuang dalam PKPB.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR senantiasa melaporkan dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran dan pelampauan BMPK, pelaporan tersebut tertuang dalam Laporan Aktivitas PE Kepatuhan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama periode pelaporan Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB disusun oleh direksi dan disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB disusun berdasarkan rencana bisnis BPR dan telah sesuai dengan ketentuan pihak OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Dukungan permodalan dari pemegang saham, SDM dan TI terhadap RBB menjadi kunci sukses terealisasinya RBB secara berkelanjutan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Telah memenuhi
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah memenuhi
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Telah memenuhi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gamon

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR GAMON

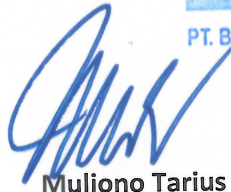
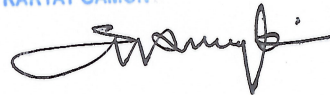
TAHUN 2023

Jakarta, 18 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:

BankGamon

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GAMON

**Muljono Tarius**
Direktur Utama**Erny Utama**
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Gamon
Alamat : Jalan Kebon Sirih No. 77, Jakarta Pusat 10340
No Telp : 021-3911914
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 65,791,598,140
Total Aset : Rp. 645,622,643,774
Status Audit : AUDITED
Bobot BPR : C
Nilai Komposit : 1.1
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa pada kertas kerja self assessment Tata Kelola, hasil penilaian penerapan Tata Kelola di PT. BPR Gamon secara umum adalah Sangat Baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas 10 (sepuluh) faktor penilaian dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

1. Sejalan dengan bertambahnya Modal Inti BPR diatas Rp.50 Miliar, untuk pemenuhan kelengkapan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada pojk no. 4 tahun 2015 tentang penerapan Tata Kelola, struktur organisasi BPR belum sepenuhnya terpenuhi dimana proses pengangkatan komisaris independen sedang dalam proses permohonan fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan. Direksi yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan pihak otoritas dari segi Integritas, Domisili, Kompetensi, Independensi dan Ketentuan Rangkap Jabatan. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Dewan Komisaris, telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dari segi Integritas, Domisili, Kompetensi, Independensi dan Ketentuan Rangkap Jabatan, dan telah melaksanakan pengawasan, pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
3. Penanganan Benturan Kepentingan, BPR telah memiliki kebijakan terkait Penerapan Benturan Kepentingan atau conflict of interest.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, dengan bertambahnya Modal Inti menjadi lebih dari Rp. 50 Miliar, PT. BPR Gamon belum sepenuhnya memenuhi Struktur Organisasi dalam penerapan Tata Kelola, karena pengangkatan penambahan satu anggota komisaris independen sedang dalam proses pengajuan fit and proper test kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern BPR telah terbentuk sehingga fungsi kerja Audit Intern dapat bekerja secara lebih baik dan Penyelesaian tindak lanjut temuan Audit OJK telah dilakukan sepenuhnya oleh Direksi PT. BPR Gamon.
6. Penerapan Fungsi Audit Extern, Penunjukan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK oleh BPR telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dan hasil Audit telah dilaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan.
7. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian intern telah diterapkan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas BPR dan Dewan

Komisaris telah senantiasa melakukan tugas pengawasan sesuai ketentuan dan panduan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

8. Batas Maksimum Pemberian Kredit, PT. BPR Gamon telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi dalam pemberian kredit kepada pihak terkait.
9. Rencana Bisnis, RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK.
10. PT. BPR Gamon telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan serta laporan pengaduan nasabah yang telah dilakukan dan tepat waktu. PT. BPR Gamon senantiasa akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Jakarta, 18 Januari 2024


Muljono Tarius
Direktur Utama


Erny Utama
Komisaris Utama